

# RENCANA KERJA PERUBAHAN

## TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP)**

Jl. A. Yani Km. 4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Telp/Fax.  
(0526) 2094165/2094163

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	1
Kata Pengantar .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SOPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD .....	19
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan SKPD .....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	22
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD .....	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja SKPD .....	27
3.3 Program Dan Kegiatan .....	27
BAB IV PENUTUP .....	31



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk dan Rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karenanya kami berharap saran serta masukan dari semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan ini akan lebih baik dan terarah.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dibuat untuk menjadi bahan serta bermanfaat bagi kita semua.

Paringin, Agustus 2022

	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	
	NOOR ASPARIAH, SP. MP
	NIP. 19660613 199802 2 003

# **BAB I**

## **PENDAHUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2022 dilakukan perubahan Renja Satpol PP Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 juga dirumuskan untuk mensinkron dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2022 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

RENJA Perubahan Satpol PP Tahun 2022 memuat Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan rencana Program dan kegiatan dalam perubahan Renja SKPD. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

### **1.2 Landasan hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Balangan adalah memfasilitasi dan upaya bagi pencapaian visi dan misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun visi dan misi dari Renstra adalah sebagai berikut :

## **“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera”**

Dan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.
4. Meningkatkan Kualitas dan layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, Budaya dan agama serta Pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamaong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun

### **Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD**

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2022 yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2022.

### **Bab IV. Penutup**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SOPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 menjalankan 2 Program dan 9 Kegiatan, adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat daerah
- e. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

**2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah kabupaten/ Kota.
- b. Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota.

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja SOPD Tahun berjalan (Thn n) yg dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SOPD Sd Semester 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SOPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		12 = 8+9+10+11		13 = 12/100	
		<b>URUSAN SEKRETARIAT</b>							
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ( Nlasi Saktip)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Akuntabilitas Kinerja ( Nlasi Saktip)	70.40	6.562.164.489		3186.651.666	50,00	48,56
1	Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Sampaikan Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang di sampaikan Tepat waktu	100 %	218.246.200	93.651.800	93.651.800	50,00	42,90
2	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4.929.856.889	6	2.514.207.251	50,00	51,00
3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	699.387.900	6	263.985.200	50,00	37,75
4	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	339.387.700	6	150.121.216	50,00	46,59
5	Terperuhnya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8.466.000	6	3.898.400	50,00	45,05
6	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	109.819.800	6	38.578.214	50,00	35,13
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	257.000.000	6	114.239.585	50,00	44,45
Capaian								50,00	43,41
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah

Alokasi anggaran pada Program ini sebesar Rp. 6.562.164.489,- dan realisasi sampai dengan triwulan II 2022 sebesar Rp. 3.186.651.666,-



## 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja SOPD Tahun berjalan (Thn n) yg dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SOPD sd Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SOPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
II.	Menurunnya Angka Pelanggaran Trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23	4.064.825.000	50	1.853.709.100	50	33,55
1	Tentanginya Gangguan Ketenteraman dan Keterban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	750	Kegiatan 3.705.385.000	6	1.683.509.100	47,33	45,43
2	Penegakan Peraturan Daerah	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / wali kota	Jumlah Peraturan Daerah yang di tagakkan	24	Perda 360.000.000	6	170.200.000	50,00	47,35
Capaian								48,67	46,39
Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah

Program Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur memiliki alokasi dana sebesar Rp.4.064.825.000,- dan realisasi sampai triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 1.853.709.100,-

Pada ke 2 (Dua) program diatas menunjukkan pencapaian predikat kinerja masih **sangat rendah**.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu sasaran Strategis yaitu, “MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF” hal tersebut dalam pelaksanaannya juga di jadikan sebagai indikator utama pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat di lihat dalam table berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Capaian	Pencapaian s/d triwulan II tahun 2022
1.	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Angka pelanggaran keamanan dan ketertiban Masyarakat	23	16

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan SOPD mengacu pada SPM TRANTIBUMLINMAS yaitu jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada, dan sampai dengan triwulan II tahun 2022 pelayanan SPM trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel berikut :

## **Perkembangan, Penerapan Dan Pencapaian**

### **Standar Pelayanan Minimal/d Triwulan II Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pelayanan</b>	<b>Target Capaian 2022</b>	<b>Pencapaian Sampai Semester 2 Tahun 2022</b>
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	132.324 Orang	900.000 Orang

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SOPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2022 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SOPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk Mewujudkan KAMTIBMAS dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif. Penciptaan kondisi kondusif dalam pengertian tentram dan tertib merupakan tugas dan tanggung jawab baik itu oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan maka tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi, hal itu tercermin dari terciptanya sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi selama tahun 2022 antara lain :

1. Adanya wabah virus corona yang melanda di sebagian besar negara di dunia, yang sangat mempengaruhi terhadap kebijakan dan ekonomi global.
2. Khusus di Indonesia dampak dari vademik covid – 19 ini sangat mempengaruhi factor ekonomi nasional, dan mengharuskan Pemerintah Daerah meminimalisir anggaran dari APBD masing- masing.
3. Disamping itu dalam pelaksanaan operasional kegiatan Satpol PP tetap melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan merupakan salah satu dari unsur garda terdepan dalam menghadapi vademik covid – 19.
4. Dalam pelaksanaan operasional sarana penunjang masih belum memadai, sehingga kegiatan dirasakan masih belum optimal sebagaimana diharapkan.
5. Secara ekstern, kondisi masyarakat kita masih belum optimal dalam mendukung program yang dilaksanakan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal.
6. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah
7. Kurangnya kesadaran Dari Masyarakat terhadap penerapan peraturan daerah yang dilaksanakan
8. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;

Adapun hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Meningkatkan kerjasama dalam sosialisasi bersama POLRI, TNI dan instansi terkait
3. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong praja dalam berbagai Pelatihan seperti Diklat Dasar, bahkan sampai Diklat Penyidik PNS.

Dari uraian tersebut menjadi bahan bagi SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dimana peningkatan kerjasama dalam sosialisasi bersama Polri, TNI dan instansi terkait, mengikutsertakan anggota satpol pp dalam berbagai pelatihan

dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan peraturan bupati menjadi fokus kami untuk dilaksanakan ditahun mendatang.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sarana penunjang operasional dalam hal ini belum adanya kelengkapan APD untuk operasional
2. Masih kurangnya personil satuan polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat Penyidik PNS.

Sedangkan beberapa peluang yang terkait dengan peningkatan keamanan yang perlu dicermati diantaranya adalah :

- a. Adanya Dukungan masyarakat

Dengan adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah maka dapat dilaksanakan dengan baik

- b. Adanya Kerjasama

Pola Kerjasama adalah salah satu usaha untuk bisa menegakkan Peraturan Daerah.

- c. Adanya Dukungan Pemerintah daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapat dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Daerah baik dari administrasi maupun teknis.

## **2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS Perubahan yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

## MATRIK ASISTENSI RENJA PERUBAHAN 2022 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROG RAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Menurunnya Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan			Menurunnya Angka Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Angka Pelanggaran Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	23 Angka pelanggaran	12.779.494.989	Angka Pelanggaran Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	23 Angka pelanggaran	14.219.530.157	1.440.035.168	Bertambah	SATPOL PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai Sakip)	Kabupaten Balangan	72,40 Nilai Sakip	6.562.164.489	Nilai Akuntabilitas Kinerja ( Nilai Sakip)	Kabupaten Balangan	72,40 Nilai Sakip	7.527.223.657	965.059.168	Bertambah	SATPOL PP
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitasi Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kabupaten Balangan	100%	218.246.200	Persentase Fasilitasi Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kabupaten Balangan	100%	218.246.200	-		SATPOL PP
Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	150.755.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	150.755.000	-		SATPOL PP
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	1 Laporan	20.871.200	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	1 Laporan	20.871.200	-		SATPOL PP
Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	46.820.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	46.820.000	-		SATPOL PP
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	100%	4.929.856.889	Persentase Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	100%	5.119.846.057	189.989.168	Bertambah	SATPOL PP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	1 Tahun	4.929.856.889	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	1 Tahun	5.119.846.057	189.989.168	Bertambah	SATPOL PP
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitasi Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	Kabupaten Balangan	100%	699.387.900	Persentase Fasilitasi Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	Kabupaten Balangan	100%	952.007.900	252.620.000	Bertambah	SATPOL PP
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	265 Stel	0	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	265 Stel	344.500.000	344.500.000	Bertambah	SATPOL PP
Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat berdasarkan tugas dan Fungsi	Kabupaten Balangan	20 Orang	573.797.900	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat berdasarkan tugas dan Fungsi	Kabupaten Balangan	20 Orang	512.797.900	(61.000.000)	Berkurang	SATPOL PP
Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	Jumlah Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan yang di ikuti	Kabupaten Balangan	4 Kegiatan	125.590.000	Jumlah Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan yang di ikuti	Kabupaten Balangan	4 Kegiatan	94.710.000	(30.880.000)	Berkurang	SATPOL PP
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase dan fasilitasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	100%	339.387.700	Persentase dan fasilitasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	100%	416.887.700	77.500.000	Bertambah	SATPOL PP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Balangan	12 Bulan	53.600.600	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Balangan	12 Bulan	53.600.600	-		SATPOL PP
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	12 Bulan	19.547.100	Jumlah Bulan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	12 Bulan	19.547.100	-		SATPOL PP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Balangan	12 Bulan	8.640.000	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Balangan	12 Bulan	8.640.000	-		SATPOL PP

Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	12 Bulan	257.600.000	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	12 Bulan	285.100.000	27.500.000	Bertambah	SATPOL PP
Dukungan Pemeliharaan sistem berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Balangan		0	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Balangan	4 Bulan	50.000.000	50.000.000	Bertambah	SATPOL PP
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	Kabupaten Balangan	100%	8.466.000	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	Kabupaten Balangan	100%	403.416.000	394.950.000	Bertambah	SATPOL PP
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	12 Bulan	8.466.000	Jumlah Bulan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	12 Bulan	203.416.000	194.950.000	Bertambah	SATPOL PP
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	1 Unit	0	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Bertambah	SATPOL PP
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Kabupaten Balangan	100%	109.819.900	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Kabupaten Balangan	100%	109.819.900	-		SATPOL PP
Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Kabupaten Balangan	12 Bulan	109.819.900	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kumunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Kabupaten Balangan	12 Bulan	109.819.900	-		SATPOL PP
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Kabupaten Balangan	100%	257.000.000	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Kabupaten Balangan	100%	307.000.000	50.000.000	Bertambah	SATPOL PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	12 Bulan	251.300.000	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	12 Bulan	251.300.000	-		SATPOL PP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Balangan	12 Bulan	5.700.000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Balangan	12 Bulan	5.700.000	-		SATPOL PP
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan		0	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	4 Bulan	50.000.000	50.000.000	Bertambah	SATPOL PP
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6.217.330.500				6.692.306.500	474.976.000	Bertambah	SATPOL PP
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	Kabupaten Balangan	100%	5.857.890.500	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	Kabupaten Balangan	100%	6.332.866.500	474.976.000	Bertambah	SATPOL PP
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	750 Kegiatan	5.370.752.400	Jumlah Kegiatan Pencegahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	750 Kegiatan	5.935.728.400	564.976.000	Bertambah	SATPOL PP
Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas yang di Bina	Kabupaten Balangan	2.355 Orang	284.728.500	Jumlah Anggota Satlinmas yang di Bina	Kabupaten Balangan	2.355 Orang	284.728.500	-		SATPOL PP
Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah MoU antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	4 MoU	202.409.600	Jumlah MoU antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	4 MoU	112.409.600	(90.000.000)	Berkurang	SATPOL PP

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	Kabupaten Balangan	100 %	359.440.000	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	Kabupaten Balangan	100 %	359.440.000	-		SATPOL PP
Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Balangan	8 Kegiatan	56.340.000	Jumlah Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Balangan	8 Kegiatan	56.340.000	-		SATPOL PP
Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	JumlahPengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kabupaten Balangan	24 Perda	303.100.000	JumlahPengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kabupaten Balangan	24 Perda	303.100.000	-		SATPOL PP



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan maupun keluhan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat diperoleh melalui beberapa cara yaitu, penyampaian langsung kepada petugas maupun melalui telepon. Beberapa usulan yang diinginkan oleh masyarakat sebagian besar berharap adanya peningkatan rasa keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat di kabupaten Balangan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

## **BAB III**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam permendagri 27 Tahun 2014 dikatakan dalam meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui :

1. Penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten /Kota melalui tindakan pre-emptive, preventif non yustisial maupun penindakannya yustisial.
2. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peningkatan tersebut untuk mewujudkan rasa tenang dan damai masyarakat Balangan dengan meningkatkan kesiagaan anggota Polisi Pamong Praja dalam menanggapi keadaan di lapangan.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan pemahaaman tentang kenyamanan dan keamanan lingkungan kepada masyarakat.
  2. Menciptakan keamanan , ketertiban dan ketentraman lingkungan sesuai dengan perundang-undangan bagi masyarakat.
  3. Mengikutsertakan aparat Satpol PP dalam berbagai pelatihan dan pendidikan supaya terpenuhi sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja yang berkualitas.
2. Meningkatkan kerjasama dalam sosialisasi bersama POLRI, TNI dan instansi terkait

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami tahun 2022 adalah peningkatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di tengah vademik covid - 19, dan pengamanan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Balangan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD**

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah berdasarkan evaluasi kerja sampai triwulan II tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa target kinerja secara umum adalah Meningkatkan Kemanan an Ketertiban Umum Serta Kenyamanan Lingkungan . Di samping sasaran – sasaran yang yang sudah ditetapkan meliputi terciptanya tertib administrasi, terciptanya situasi kondusif dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat, terciptanya tugas operasional secara efektif dan efisien.

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Sebagaimana dikatakan bahwa tujuan dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk Meningkatkan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat. Satuan Polisi mempunyai 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, yang sebelum Renja Perubahan tahun 2022 terdiri dari 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, dengan penambahan biaya sebesar Rp1.440.035.168,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Untuk Lebih Jelasnya dapat di Lihat pada Tabel Berikut :

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PRORAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN (+/-)
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGN MASYARAKAT	12.779.494.989	14.219.530.157	1.440.035.168
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.562.164.489	7.527.223.657	965.059.168
1	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	218.246.200	218.246.200	-
	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	150.755.000	150.755.000	-
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.871.200	20.871.200	-
	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	46.820.000	46.820.000	-
2	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	4.929.856.889	5.119.846.057	189.989.168
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.929.856.889	5.119.846.057	189.989.168
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	699.387.900	952.007.900	252.620.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	344.500.000	344.500.000
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	573.797.900	512.797.900	(61.000.000)
	Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	125.590.000	94.710.000	(30.880.000)
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	339.387.700	416.887.700	77.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.600.600	53.600.600	-
	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	19.547.100	19.547.100	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	8.640.000	8.640.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	257.600.000	285.100.000	27.500.000
	Dukungan Pemeliharaan sistem berbasis Elektronik Pada SKPD	0	50.000.000	50.000.000
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH	8.466.000	403.416.000	394.950.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8.466.000	203.416.000	194.950.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	200.000.000	200.000.000
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	109.819.900	109.819.900	-
	Penyediaan Jasa Kumonikasi sumber daya air ,dan Listrik	109.819.900	109.819.900	-
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	257.000.000	307.000.000	50.000.000



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.300.000	251.300.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.700.000	5.700.000	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	0	50.000.000	50.000.000
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	6.217.330.500	6.692.306.500	474.976.000
	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA	5.857.890.500	6.332.866.500	474.976.000
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksana an Patroli pengamanan dan Pengawasan	5.370.752.400	5.935.728.400	564.976.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	284.728.500	284.728.500	-
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	202.409.600	112.409.600	(90.000.000)
<b>9</b>	<b>PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA</b>	359.440.000	359.440.000	-
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	56.340.000	56.340.000	-
	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	303.100.000	303.100.000	-

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022 dibuat dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan dengan mengacu RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam merumuskan program dan kegiatan perubahan tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Paringin, Agustus 2022

	
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	
	NOOR ASPARIAH, SP. MP
	NIP. 19660613 199802 2 003

---